

LIBRARIA

Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Perluakah Kita Memiliki Kurikulum Nasional Ilmu Perpustakaan dan Informasi?

Sulistyo-Basuki

Pendekatan Interaksi Sosial dalam Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Laksmi

Urgensi Data Protecion Bidang Perpustakaan dan Informasi

Wiji Suwarno

Kajian Teoritis Mengenai Metode LibQUAL+TM untuk Mengevaluasi Kualitas Layanan Perpustakaan

Endang Fatmawati

Audit Informasi dalam Sistem Informasi Manajemen

Rasdanelis

Total Quality Service (TQS) sebuah Alternatif Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi

Safrudin Aziz

Arus Informasi Global: Peran Informasi dan Teknologinya dalam Pembangunan Ekonomi

Muslim

Transformasi Sosial dalam Masyarakat Informasi Sebuah Tinjauan tentang Akses Informasi

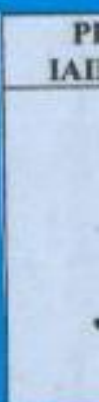
Ummi Rodliyah



**UNIVERSITAS MUHAMADIYAH
MAGELANG**



Perpustakaan UNIKA Soegijapranata
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Semarang 50234, Telp. (024) 844155 ext.184
email: fpptijawatengah@yahoo.com



Transformasi Sosial dalam Masyarakat Informasi Sebuah Tinjauan tentang Akses Informasi

Umami Rodliyah*

Abstrak:

Masyarakat informasi adalah masyarakat dimana kualitas hidup, serta prospek untuk perubahan sosial, dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. Dalam masyarakat seperti ini standar hidup, pola-pola kerja, kesenangan, sistem pendidikan dan pemasaran barang-barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan intensitas produksi informasi dan pelayanan serta komunikasi yang luas melalui media yang sebagian besar dilakukan secara elektronik. Masyarakat informasi tercermin dari penggunaan produk-produk elektronik yang bernuansa komputer. Tulisan ini mengangkat materi tentang perubahan sosial yang diakibatkan perkembangan informasi dalam masyarakat serta membidik perilaku masyarakat itu dalam mengakses informasi yang dibutuhkannya.

Kata kunci: Transformasi sosial, masyarakat informasi, akses informasi

*Penulis adalah Pustakawan pada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan informasi semakin meningkat pada dasawarsa terakhir, sehingga orang sering memberikan istilah dengan masyarakat informasi. Feather (1994) menyatakan secara implisit bahwa masyarakat informasi tercermin dari penggunaan produk komputer, media elektronik dan media Audio-visual yang dominan pada masyarakat. Alat-alat ini telah ditransformasikan secara nyata dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Transformasi itu terjadi dalam waktu yang relatif singkat diberbagai aspek dari manajemen perkantoran, telekomunikasi, dan berbagai bentuk penyiaran TV dengan transformasi tanpa batas. Hal ini terus berkelanjutan dan pengalaman sejarah mengisyaratkan bahwa sesuatu itu telah mengalami peningkatan.

Dalam era informasi, jarak fisik atau jarak geografis tidak lagi menjadi faktor dalam hubungan antar manusia atau antar lembaga usaha, sehingga jagad ini menjadi suatu dusun semesta atau "*Global village*". Sehingga istilah "jarak sudah mati" atau "*distance is dead*" semakin nyata kebenarannya. Adanya Merger Teknologi, perubahan pola tingkah laku dan gaya hidup atau *lifestyle* serta perubahan isue-isue sosial masyarakat.

Terbentuknya masyarakat informasi melalui proses transisi dari masyarakat sebelumnya yaitu masyarakat pra pertanian, masyarakat pertanian dan masyarakat industri, yang dipacu atau dipercepat dengan terjadinya perubahan teknologi komunikasi yang semuanya menyebabkan terjadinya dinamika sosial dalam masyarakat termasuk ekonomi, keuangan dan bidang politik.

Pada era informasi saat ini masyarakat atau komunitas-komunitas yang mendapat cukup kesempatan untuk akses informasi secara cepat dan tepat akan jauh lebih maju dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapat kesempatan untuk akses dalam arti aksesnya terbatas.

RM. Mwinymbegu (1993) sebagaimana dikutip oleh Romanus Beni mengungkapkan bahwa 4 (empat) ciri utama negara berkembang yang berpengaruh terhadap transfer teknologi adalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, lebih banyak tenaga kerja yang tidak terampil, dan keberadaan kebudayaan lokal (tradisional) yang sangat kuat. Keempat hal tersebut telah menghambat transfer informasi dan berpengaruh pada dampak yang akan timbul oleh derasnya arus informasi yang masuk

A. Hambatan dalam Transformasi Informasi

Arus informasi mengalir dari negara-negara maju dan dijadikan komoditi ekonomi untuk dijual kepada negara-negara berkembang. Masyarakat yang mendapatkan informasi lebih dulu, akses lebih luas dan tepat waktu akan dapat menguasai dunia. Sementara kelompok

masyarakat yang kurang memperoleh kesempatan dan akses informasi yang mereka butuhkan secara memadai akan jauh tertinggal. Diantara mereka terdapat jurang pemisah yang berdampak kepada kehidupan sosial ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Bahkan karena kesenjangan perolehan informasi ini, kelompok yang kurang beruntung dapat menjadi korban atas kelompok yang lain.

Empat ciri utama negara berkembang yang dianggap berpengaruh terhadap transfer informasi adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Pada era informasi, kekuatan (*power*) akan jatuh ke tangan mereka yang menguasai informasi dan dapat mengendalikannya dengan cepat termasuk mengendalikan ekonomi.

2. Tingkat pendidikan yang rendah

Keterbatasan pendidikan sangat berpengaruh terhadap akses informasi. Rintangan utama dengan ciri ini adalah kelemahan dalam berbahasa Internasional. Sehingga cenderung bingung dalam menghadapi ledakan informasi yang sebigaian besar menggunakan bahasa internasional tersebut.

3. Banyaknya tenaga kerja yang tidak terampil

Jumlah tenaga kerja yang tidak terampil (*unskilled labor*) pada negara berkembang lebih banyak bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang terampil (*skilled labor*). Sebagaimana masyarakat berpendidikan tinggi menerima dampak positif informasi, maka dampak tersebut juga terjadi pada tenaga-tenaga terampil (*skilled labor*), sementara tenaga kerja pada negara berkembang lebih banyak yang tidak terampil dan memperoleh dampak yang negatif dari informasi.

4. Tradisi budaya lokal (tradisional) yang kuat

Masyarakat yang melaksanakan budaya tradisional yang kuat menyebabkan mereka cenderung menolak budaya dari luar. Namun demikian negara berkembang tidak mampu membendung arus informasi yang masuk. Sehingga budaya tradisional telah terkontaminasi dengan budaya luar. Dengan ciri ini masyarakat negara berkembang cenderung menerima dampak negatif arus informasi. (Beni, 1998 : 48)

B. Fungsi Informasi dalam Transformasi Sosial

Pada akhir masyarakat industri yang merupakan awal era informasi di sekitar tahun 1950-an, pekerja di bidang media / informasi telah mencapai 30% dari berbagai jenis pekerjaan dan merupakan

perkembangan yang pesat dari jumlah sebelumnya yang hanya 10% yaitu pada akhir tahun 1900. Pada akhir 50-an dimana mulai berkembang teknologi komunikasi bersamaan dengan berkembangnya teknologi komputer, maka pekerja yang bergerak di bidang media dan informasi menjadi sekitar separuh dari jumlah jenis pekerjaan yang ada, yang ini dimulai sekitar akhir tahun 60-an.

Konvergensi media ini terwujud melalui beberapa jalan, antara lain terjadinya integrasi teknologi, merging dari perusahaan-perusahaan media, perubahan *lifestyle*, pola dan jenis karir, peraturan-peraturan, dan isu-isu sosial, yang kesemuanya menyebabkan terjadinya dinamika sosial dalam masyarakat.

Hal yang penting dalam masyarakat informasi adalah adanya kebebasan memperoleh informasi dan keberhasilan media masa serta deklarasi atau pengakuan atas pluralisme budaya.

Ada beberapa fungsi media informasi dalam transformasi sosial yaitu :

1. *Memetics*

Yaitu fungsi media informasi dalam transformasi sosial yang dianalogkan seperti halnya gen dalam sel hidup manusia yang bisa membiak dan mengalami evolusi. Sukses *meme* meliputi 3 (tiga) hal yaitu : usia sepanjang-panjangnya (*longevity*), tersebar seluas-luasnya (*Fecendity*) dan berketurunan seasli-aslinya (*Copying fidelity*). Saat media informasi berkembang begitu pesat, dan masyarakat begitu mudah memperoleh informasi dan menjadi sasaran tembak informasi, maka proses memetic juga berlangsung sangat cepat. Para ahli komunikasi meyakini bahwa terpaan informasi itu sangat berpengaruh terhadap percepatan transformasi sosial

Walaupun dalam banyak kasus, proses meme ini tidak selalu berjalan selaras, sebab banyak juga yang melewati jalur ketegangan (*cognitive dissonance*). Jika informasi bersifat kontradiktif dengan pemahaman, nilai pola pikir (*mindset*) maupun tradisi masyarakat pemakainya, maka akan terjadi goncangan psikologis, kultural, hingga menimbulkan ketegangan sosial. Sebaliknya jika informasi bersifat signifikan dengan harapan-harapan, pengalaman, maupun referensi maka akan semakin menguatkan eksistensi sosial yang ada.

2. *Beware Surveillance*

Yaitu fungsi media informasi sebagai pemberi peringatan kepada publik (*warring*) mengenai situasi dan kondisi yang mengancam seperti konsistensi memberitahukan meletusnya gunung, depresi

kondisi ekonomi, kejahatan besar memburuknya inflasi, serangan militer dan lain-lain.

3. Instrumental Surveillance

Yaitu fungsi media informasi dalam memberitahukan hal-hal yang menolong (*helpful*) dan penuh kegunaan (*useful*) bagi individu dalam kehidupan sehari-hari. (Panuju, 2000: http://www.infoperpus.8m.com/news/2002/11012002_1.htm)

Melalui teori Memetics dapat ditarik kesimpulan suatu hipotesa bahwa hitam-putihnya media informasi mempunyai potensi menggiring transformasi sosial yang sama. Hipotesis ini dikuatkan lagi dengan beberapa teori yang mendukungnya. Dalam pendekatan *S-R (Stimulus-Respons)* dikenal istilah pengondisian (*Conditioning*) artinya eksistensi individu dan sosial (mulai dari sikap, pemikiran, selera, preferensi, sampai perilakunya) bisa dibentuk oleh penetrasi informasi yang terus menerus.

Untuk itu dalam masyarakat itu sendiri harus memiliki mekanisme selektif untuk menentukan seseorang itu terpengaruh atau tidak oleh suatu informasi (*Selective Attention*) atau perhatian yang selektif apalagi dengan dijangkaunya kebebasan memperoleh informasi. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Redi Panuju bahwa dalam proses memetics semacam itu transformasi sosial sangat tidak kondusif untuk membangun masyarakat komunikatif seperti yang dicita-citakan oleh Jurgen Habermas. Masyarakat Komunikatif menurut Habermas harus memenuhi asas klaim kebenaran (*truth*), klaim ketepatan (*rightness*), klaim kejujuran (*sincerety*), dan klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*)

C. Dampak Informasi Terhadap Transformasi Sosial.

Dengan berkembangnya *Information and Communication Technology (ICT)* pada Masyarakat Informasi, maka berkembang pula proses-proses komunikasi. Komunikasi interpersonal seolah-olah menjadi tidak berjarak, dapat dilaksanakan serentak lebih dari dua orang, jarak dalam cara berkomunikasi tidak lagi menjadi kendala.

Awalnya teknologi-teknologi berkembang sendiri-sendiri, akibat perkembangan itu, teknologi-teknologi tersebut menjadi saling terkait. Perbedaan-perbedaan di dalam hal pengumpulan, pengiriman, penyimpanan, dan pengolahan informasi telah dapat diatasi. Industri komputer berkembang sangat pesat memicu perkembangan teknologi lain, komputer juga berperan dalam perkembangan teknologi telekomunikasi.

Terjadi merger kemampuan, baik antara orang yang berkomunikasi dengan pencipta *software* yang digunakan dalam berkomunikasi maupun diantara orang-orang yang berkomunikasi menggunakan fasilitas ICT. Dalam waktu yang relatif singkat orang yang berkomunikasi akan segera diperkaya informasinya, sehingga mempunyai kemungkinan merubah pandangan-pandangannya dalam waktu yang relatif singkat. Akhirnya bidang ilmu dan lapangan kerja di bidang komunikasipun berkembang.

Berbagai perkembangan kondisi yang diungkap diatas, berdampak pula bagi pola aktivitas komunikasi yang diistilahkan sebagai berkembangnya pola dan fungsi serta manfaat interaktivitas atau interactivity dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk ekonomi, keuangan dan bidang politik. <http://meiliemma.wordpress.com/2006/10/17/evolusi-media-menuju-masyarakat-informasi/>.

Ada beberapa aspek sosial budaya yang berkaitan dengan dampak globalisasi informasi dan teknologi komunikasi yaitu antara lain pola tingkah laku, kehidupan keluarga, pendidikan, dan tatanan tradisional yang saling berkaitan cukup erat satu sama lainnya.

1. Pola Tingkah Laku

Bersamaan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan cepat terjadi dimana-mana, dalam masyarakat maupun diri kita, Inovasi audio visual (televisi) telah membawa masyarakat memasuki budaya baru, yakni "demam televisi". Kini mulailah televisi mengatur dan menentukan pola pikir serta prilaku masyarakat. Tanpa disadari juga telah mengatur jadwal hidup dan menciptakan sejumlah kebutuhan. Hal ini berarti bahwa globalisasi informasi dan teknologi komunikasi telah menyentuh segenap struktur kehidupan masyarakat, termasuk pola-pola prilaku yang mengalami pergeseran bentuk. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat paparan seorang tokoh sebagai berikut: "Diilustrasikan oleh Dennis Mc Quaill, media massa mampu mengubah perilaku khalayak dalam keadaan apapun, terlebih lagi media Audio-visual yang pesan-pesannya seakan menghipnotis massa dalam berperilaku. Banyak orang melakukan identifikasi diri atau bahkan melakukan empati terhadap "Public Figur". Kekuatan media massa itu telah melahirkan tabiat "instan mania" manusia modern.(Trimarsanto, 1993:8)

Pergeseran-pergeseran pola tingkah laku yang diakibatkan oleh globalisasi informasi dan komunikasi tersebut dalam kenyataan telah menyangkut banyak bidang, antara lain : perubahan tingkah

laku dalam keluarga, di sekolah, dan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menyangkut, mobilitas sosial dan geografis, gaya hidup, pemilikan barang dan proses pengambilan keputusan.

2. Pendidikan

Pengaruh globalisasi informasi terhadap pendidikan dapat dipandang dari dua sisi, baik positif maupun negatif. Sementara dampak positif dari media massa telah menjadikan peserta didik lebih kritis dan berani mengemukakan pendapat serta mendapat banyak bahan pengkayaan sehingga hubungan antara guru dan murid cenderung bersifat horizontal sebagai teman dengan metode musyawarah. Namun dari segi negatifnya tak dapat dipungkiri bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi telah menyebabkan gejala meningkatnya kenakalan siswa, perbuatan asusila dan sebagainya. Dampak tersebut juga terjadi pada pendidikan keluarga, dan masyarakat. Seperti terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya kita, meningkatnya kriminalitas dan keberingasan sosial, free sex, dan berbagai bentuk pelecehan seksual.

3. Tatanan Tradisional

Di dalam masyarakat, nilai-nilai budaya itu berfungsi sebagai sistem kelakuan dan pedoman tingkah laku manusia, seperti hukum adat, aturan-aturan sopan santun yang menurut Reksodihardjo (1990) nilai-nilai budaya tersebut wajib dilestarikan dan dipupuk karena merupakan pranata atau institution yang berpola dari manusia dan kebudayaan. Hal ini termasuk aturan-aturan sosial, norma-norma, adat istiadat dan semua nilai budaya yang masih berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dampak globalisasi terhadap tatanan tradisional dan nilai-nilai budaya ini dapat dilihat pada pergeseran nilai-nilai tersebut dalam masyarakat dimana sikap individualisme, materialisme mulai mempengaruhi pandangan masyarakat. (Murnianto, dkk : 1997)

D. Bentuk-bentuk Transformasi Sosial Dalam Masyarakat Informasi

Beberapa contoh fenomena sosial masyarakat akibat adanya informasi global adalah sebagai berikut :

1. Prilaku Gank Motor

Fenomena Gank Motor akhir-akhir ini banyak menjadi berita yang dianggap telah meresahkan warga. Khususnya di kota Bandung, fenomena genk motor dan komunitasnya semakin menjamur dari ber-

bagai macam kalangan, mulai dari anak SMP sampai Perguruan Tinggi sehingga penyakit masyarakat ini perlu segera di obati.

Awal berdrinya genk motor ini mulai muncul di Negara Amerika Serikat. Jenis dari genk inipun bermacam-macam diantaranya ada tiga tipe genk:

1. Genk pencurian (*thief gangs*) komunitas ini biasanya berkelompok melakukan pencurian yang mula-mula hanya untuk menguji keberanian anggota kelompok.
2. Genk konflik (*conflick gangs*). kelompok ini suka sekali mengekspresikan dirinya melalui perkelahian berkelompok agar tampak gagah dan diclimb sebagai pemberani.
3. Genk pengasingan (*reatreats gangs*). kelompok geng ini justru sengaja mengasingkan dirinya dari kegiatan minuman-minuman keras dan napza yang kera dianggap suatu cara pelarian kenyataan ([http:// bandungnews1.wordpress.com/2007/11/08/bangga-jadi-anggota-gank-motor/](http://bandungnews1.wordpress.com/2007/11/08/bangga-jadi-anggota-gank-motor/))

Mereka ini sering diidentifikasi dengan kekerasan, kriminalitas dan sebagainya. Karena masing-masing mereka memiliki sistem nilai yang berbeda dari kultur dominan. Biasanya masing-masing subkultur memiliki nilai dan peraturan berbeda-beda untuk mengatur anggota kelompoknya.

Mereka mempunyai sifat cenderung agresif dan menantang bahaya. Setiap anggotanya merasa bangga untuk melakukan sensasi sebagai perbuatan kriminal Secara psikologi orang cenderung berani jika berada dalam suatu rombongan atau gerombolan. Jika gerombolan itu tergabung dalam suatu gank motor, keberanian makin menjadi. Memepet orang lain, merasa jadi penguasa di jalan raya, membunyikan sirene hingga melabrak lampu merah.

2. Runtuhnya Unisoviet

Berawal dari program-program yang diperkenalkan oleh Gorbachev dalam rangka pembaharuan yang justru menyebabkan runtuhnya ekonomi komando administrative Soviet melalui program-programnya: *glasnost* (keterbukaan politik), *perestroika* (restrukturisasi ekonomi), dan *uskoreniye* (percepatan pembangunan ekonomi). Ekonomi Soviet menderita karena inflasi tersembunyi dan kekurangan pasokan yang terjadi di mana-mana yang diperparah oleh semakin meningkatnya pasar gelap yang terbuka yang menggerogoti ekonomi resmi. Selain itu, biaya status sebagai negara adikuasa militer, KGB, subsidi bagi negara-negara klien sudah sangat berlebih-lebihan, melam-

pau ekonomi Soviet. Gelombang baru industrialisasi yang didasarkan pada teknologi informasi telah membuat Uni Soviet kelabakan mencari teknologi barat dan kredit untuk mengatasi keterbelakangannya yang kian menjadi-jadi.

Glasnost memberikan kebebasan berbicara yang lebih besar. Pers menjadi jauh lebih merdeka, dan ribuan tahanan politik dan banyak pembangkang di bebaskan. Sementara tujuan utama Gorbachev dalam mengadakan *glasnost* adalah untuk menekan kaum konservatif yang menentang kebijakan-kebijakan restrukturisasi ekonominya, ia pun berharap melalui berbagai keterbukaan, debat dan partisipasi, rakyat Soviet akan mendukung inisiatif-inisiatif pembaruannya.

Kebijakan-kebijakan yang mulanya dimaksudkan sebagai alat untuk merangsang ekonomi Soviet, *perestroika* dan *glasnost* segera menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan.

Pengenduran sensor di bawah *glasnost* mengakibatkan Partai Komunis kehilangan genggamannya yang mutlak terhadap media. Tak lama kemudian, banyak media yang mempermalukan pemerintah, mereka menyingkapkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang parah yang telah lama disangkal dan ditutup-tutupi oleh pemerintah Soviet. Masalah-masalah seperti perumahan yang buruk, alkoholisme, penyalahgunaan obat-obatan, polusi, korupsi, juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Stalin dan rezim Soviet.

Bangkitnya nasionalisme di bawah *glasnost* segera membangkitkan kembali ketegangan-ketegangan etnis yang bergolak di berbagai republik Soviet, sehingga semakin mendiskreditkan cita-cita tentang persatuan rakyat Soviet. Sebuah contohnya terjadi pada Februari 1988, ketika pemerintahan di Nagorno-Karabakh, suatu wilayah yang didominasi oleh etnis Armenia di Republik Azerbaijan, meluluskan sebuah resolusi yang menyerukan unifikasi dengan Republik Soviet Sosialis Armenia. Kekerasan terhadap orang-orang Azerbaijan setempat dilaporkan di televisi Soviet, sehingga menimbulkan pembantaian terhadap orang-orang Armenia di kota Sumgait, di Azerbaijan

Pada 7 Februari 1990 Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet setuju untuk melepaskan monopoli atas kekuasaan. Republik-republik anggota Uni Soviet mulai menegaskan kedaulatan nasional mereka terhadap Moskwa, dan mulai melancarkan "perang undang-undang" dengan pemerintah pusat di Moskwa. Dalam hal ini, pemerintahan republik-republik anggota Uni Soviet membatalkan semua undang-undang negara kesatuan apabila undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang lokal, menegaskan kendali mereka terhadap

ekonomi lokal dan menolak membayar pajak kepada pemerintah pusat di Moskwa. Pergumulan ini menyebabkan macetnya ekonomi, karena garis pasokan dalam ekonomi rusak, dan menyebabkan ekonomi Soviet semakin merosot ([http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Uni_Soviet_\(1985-1991\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Uni_Soviet_(1985-1991))).

Sejarah Unisoviet tersebut telah memberikan gambaran kepada kita betapa peran media informasi sangat besar dalam rangka transformasi sosial dan kedaulatan suatu negara.

Dari kedua kasus diatas (Prilaku gank motor dan runtuhnya Unisoviet) dapat terlihat betapa arus informasi global tanpa mempunyai pengaruh yang besar. Sebenarnya bukan hanya gank motor tetapi masih banyak prilaku kenakalan remaja seperti pertarungan antar pelajar, antar gank, antar kampung dan sebagainya yang kesemuanya dipicu dan dipengaruhi oleh adanya informasi global dan ketidakmampuan mereka dalam mengevaluasi dan menggunakannya dengan tepat.

Salah satu aspek penting agar sebuah bangsa bisa keluar sebagai pemenang di abad ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan *information literacy* masyarakatnya. Bila hal tersebut dapat dilaksanakan maka akan muncul kekuatan *information competency*, yaitu kemampuan untuk mendayagunakan informasi yang diperolehnya untuk meningkatkan kinerja aktivitas sehari-hari.

Di negara-negara maju, masyarakatnya sudah memiliki tingkat *information literacy* yang cukup tinggi, dan akselerasi pertumbuhan ekonominya tidak lepas dari hasil yang didapat dari terpenuhinya *information literacy* pada masyarakatnya. Karena untuk dapat maju dan berkembang di era ini tidak hanya menguasai sumberdaya 4 M saja (*men, materials, money, machibe/method*) saja tetapi juga perlu tambahan K (*knowledge*). Dan *information literacy* adalah sarana untuk terpenuhi penguasaan sumberdaya K (*knowledge*) tersebut.

Salah satu masalah yang ada pada masyarakat adalah terdapatnya *digital gap* (kesenjangan digital) antar generasi di masyarakat. Generasi muda (*new/next generation*) adalah kelompok masyarakat yang akan memiliki tingkat *e-literacy* yang tinggi, namun generasi ini baru akan memberikan kontribusinya langsung pada masyarakat dikemudian hari. Maka terdapat dua generasi yang akan berpengaruh langsung terhadap masyarakat, yaitu *today's generation* dan *old generation*. *Old generation* akan secara bertahap memberikan tongkat estafetnya kepada *today generation*. Yang menjadi masalah di Indonesia adalah tingkat *e-literacy* pada *today generation* masih

ekonomi lokal dan menolak membayar pajak kepada pemerintah pusat di Moskwa. Pergumulan ini menyebabkan macetnya ekonomi, karena garis pasokan dalam ekonomi rusak, dan menyebabkan ekonomi Soviet semakin merosot ([http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Uni_Soviet_\(1985-1991\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Uni_Soviet_(1985-1991))).

Sejarah Unisoviet tersebut telah memberikan gambaran kepada kita betapa peran media informasi sangat besar dalam rangka transformasi sosial dan kedaulatan suatu negara.

Dari kedua kasus diatas (Prilaku gank motor dan runtuhnya Unisoviet) dapat terlihat betapa arus informasi global tanpa mempunyai pengaruh yang besar. Sebenarnya bukan hanya gank motor tetapi masih banyak prilaku kenakalan remaja seperti pertarungan antar pelajar, antar gank, antar kampung dan sebagainya yang kesemuanya dipicu dan dipengaruhi oleh adanya informasi global dan ketidakmampuan mereka dalam mengevaluasi dan menggunakannya dengan tepat.

Salah satu aspek penting agar sebuah bangsa bisa keluar sebagai pemenang di abad ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan *information literacy* masyarakatnya. Bila hal tersebut dapat dilaksanakan maka akan muncul kekuatan *information competency*, yaitu kemampuan untuk mendayagunakan informasi yang diperolehnya untuk meningkatkan kinerja aktivitas sehari-hari.

Di negara-negara maju, masyarakatnya sudah memiliki tingkat *information literacy* yang cukup tinggi, dan akselerasi pertumbuhan ekonominya tidak lepas dari hasil yang didapat dari terpenuhinya *information literacy* pada masyarakatnya. Karena untuk dapat maju dan berkembang di era ini tidak hanya menguasai sumberdaya 4 M saja (*men, materials, money, machibe/method*) saja tetapi juga perlu tambahan K (*knowledge*). Dan *information literacy* adalah sarana untuk terpenuhi penguasaan sumberdaya K (*knowledge*) tersebut.

Salah satu masalah yang ada pada masyarakat adalah terdapatnya *digital gap* (kesenjangan digital) antar generasi di masyarakat. Generasi muda (*new/next generation*) adalah kelompok masyarakat yang akan memiliki tingkat *e-literacy* yang tinggi, namun generasi ini baru akan memberikan kontribusinya langsung pada masyarakat dikemudian hari. Maka terdapat dua generasi yang akan berpengaruh langsung terhadap masyarakat, yaitu *today's generation* dan *old generation*. *Old generation* akan secara bertahap memberikan tongkat estafetnya kepada *today generation*. Yang menjadi masalah di Indonesia adalah tingkat *e-literacy* pada *today generation* masih

terbilang cukup rendah. Hal ini tentunya akan berdampak pada terbentuknya *neu/next generation*. Untuk itulah perlu usaha keras agar terjadi akselerasi penguasaan *e-literacy* pada *today generation*.

Disinalah peran pustakawan dan perpustakaan sangat diharapkan dalam rangka ikut mewujudkan akselerasi penguasaan *e-literacy* pada *today generation*. Sehingga muncul kekuatan *information competency*, yaitu kemampuan untuk mendayagunakan informasi yang diperolehnya untuk meningkatkan kinerja generasi penerus yang pada akhirnya kita siap menjadi bangsa pemenang.

E. Kebebasan Akses Informasi

Kebebasan informasi merupakan keharusan dalam masyarakat informasi. Dengan kebebasan memperoleh informasi akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Persamaan hak dalam akses informasi (*Aquality of Access*) akan mengurangi kesenjangan perolehan informasi masyarakat. Karena perbedaan yang terlalu dalam hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial. (*If one regards access to information as a universal human right in a democracy, then it is the possibility of access that is most important even if this is unlikely to be exercised or is exercised by proxy by press or by various pressure groups. It helps create a sense of social cohesion*) (Eisenschitz, 1995 :156)

Sebagaimana Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pasal 19 bahwa kebebasan menyampaikan pendapat mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan gagasan apapun, tanpa memandang bata-batas, baik lisan maupun tulisan, dalam bentuk seni atau media menurut pilihannya. Sementara di Indonesia Rancangan Undang-undang Kebebasan Informasi Publik (RUU KIP) sedang dalam pembahasan di tingkat Panitia kerja DPR dan akan segera diberlakukan pada tahun 2010. Didalamnya terdapat ancaman sanksi denda untuk Badan yang menghambat akses informasi.

Namun definisi hukum tentang informasi lingkungan, publik dan badan publik belum diatur dalam hukum positif tetapi hanya pada RUU Kebebasan Informasi yang diusulkan oleh Koalisi NGO untuk Kebebasan Informasi. Ketidakjelasan tentang definisi dari ketiga hal tersebut mengakibatkan multi-interpretasi oleh otoritas publik dalam penyampaian informasi. http://www.icel.or.id/akses_informasi_partisipasi_dan_keadilan_di_indonesia.icel

Sesuai dengan yang terdapat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tindakan yang termasuk menghambat akses informasi publik

adalah sengaja tidak memberikan informasi proaktif, tidak memberikan informasi secara berkala, tidak memberi informasi secara serta merta, tidak memberikan informasi setiap saat, sengaja merusak atau menghancurkan informasi dan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Kebutuhan informasi

Pilihan seseorang akan informasi ditentukan oleh posisinya dalam sistem sosial. Informasi selamanya memiliki fungsi pragmatis bagi penggunaannya. Seseorang yang memiliki peran dalam sistem sosial, secara hipotetis dapat dibayangkan akan lebih memerlukan materi informasi faktual. Karena dengan informasi faktual ini dia menempatkan dirinya dalam interaksi sosial. Sebaliknya, semakin tidak berperan seseorang dalam kehidupan sosial, dengan sendirinya relatif dia tidak memerlukan informasi faktual. Ini kiranya dapat menjelaskan mengapa informasi hiburan lebih banyak peminatnya. Struktur masyarakat bersifat elitis, dengan jumlah terbatas person dalam peran sosial. Elit sosial yaitu person yang memiliki peran dalam kehidupan sosial dalam skala tertentu. Skala lingkup kehidupan sosial inilah akan menentukan tipe informasi yang relevan bagi seseorang dalam peran sosialnya.

Era reformasi diharapkan akan mengubah konfigurasi sekaligus personal elit sosial. Secara makro otonomi daerah akan menggerakkan berbagai institusi sosial yang ada di suatu wilayah. Tumbuh dan berkembangnya institusi sosial yang memiliki independensi dan otonomi akan memunculkan elit sosial dalam peran institusional masing-masing. Lingkup dan skala perannya akan menentukan tingkat negosiasi sosial yang harus dijalankan. Pada situasi ini dia akan memerlukan informasi faktual yang relevan dan objektif.

Seluruh proses sosial dalam tataran demokratis adalah negosiasi sosial, akuntabilitas setiap institusi negara, dan kredibilitas personal setiap elit sosial dalam kehidupan negara. Dalam latar semacam inilah kehadiran media pers (media jurnalisme) merupakan *conditio sine qua non*. Seluruh proses sosial dalam kehidupan negara hanya akan dapat berjalan jika disangga oleh kehadiran media jurnalisme yang menyediakan informasi faktual yang relevan dalam kehidupan sosial. Tetapi tentunya hanya media pers bebas dan memiliki otonomi yang dapat berfungsi dalam kondisi ini. Pers Pembangunan ala Orde Baru dengan sendirinya tidak punya tempat, bahkan akan mengganggu dalam proses negosiasi sosial. Pers dituntut untuk mampu menyampaikan fakta sosial secara obyektif, sehingga harus dapat dibedakan dengan

tegas antara media pers sebagai institusi sosial dengan media pers yang menjalankan fungsi partisan. Informasi sepihak pada dasarnya bersifat instruksional, tidak dapat membukakan kemampuan personal dalam menilai fakta sosial. Informasi faktual menjadi bahan baku bagi setiap elit sosial dalam menentukan posisi dalam proses negosiasi sosial. <http://kipas.wordpress.com/2007/07/19/hak-hak-masyarakat-terhadap-media-pers/>

Kemampuan Akses Informasi

Sebagaimana tersirat dalam RUU KIP, transparansi dan kebebasan memperoleh informasi bergantung pada kemampuan masyarakat dalam melihat, membaca, mengetahui, dan mengerti informasi publik (terekam). Secara tegas kita ingin mengatakan bahwa akses, ketersediaan, dan ketersebaran informasi publik tidak cukup, jika akhirnya informasi itu tidak dapat dengan mudah dilihat, dibaca, diketahui, dan dimengerti isinya. Dengan kata lain, transparansi dan kebebasan informasi ini berdiri di atas apa yang disebut "keberaksaraan" (*literacy*). Maka kemampuan akses informasi ini berhungan erat dengan issue akan literasi informasi (*Information Literacy*) yang diantaranya didefinisikan sebagai berikut:

American Library Association menyatakan bahwa seseorang dikatakan *information literate* jika orang tersebut mampu mengenali ketika ia membutuhkan informasi, dan mampu mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkannya tersebut secara efektif (*to be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information.*

Dalam konteks yang lebih luas UNESCO mendefinisikan seseorang yang beraksara informasi adalah orang yang mengetahui bilamana mereka membutuhkan informasi, kemudian mampu mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, mengorganisasi, dan menggunakan informasi itu secara efektif untuk menjawab dan membantu menyelesaikan masalah/isu personal, pekerjaan, dan masalah sosial yang lebih luas. (*Information literate people have been described as those who know when they need information, and are then able to identify, locate, evaluate, organise, and effectively use the information to address and help resolve personal, job related, or broader social issues and problems*). (Hatiyadi, 2005 : 35-36)

Lebih dari itu Putu Laxman Pendit mengungkapkan kutipan definisi dari A. Luke sebagai berikut :

... *the extent to which people and communities can take part, fluently, effectively and critically, in the various text - and discourse - based events that characterize contemporary semiotic societies and economies (...)* To be literate is to be an everyday participant in literate societies, themselves composed of a vast range of sites, locations and events that entail print, visual, and analogue media. (A. Luke, 2003:51)

Berdasarkan definisi di atas, keberaksaraan tidaklah cukup ditandai oleh tingkat melek huruf. Jumlah penduduk yang dapat membaca aksara bahasa Indonesia bukan ciri utama dari *literacy*. Seseorang baru dapat dikatakan *literate* jika ia mampu secara fasih dan efektif ikut dalam dialog di masyarakatnya, sedemikian rupa sehingga dia dikatakan ikut berpartisipasi dalam kehidupan yang sesungguhnya. Dengan demikian, apa yang kita maksudkan dengan transparansi dan kebebasan memperoleh informasi dalam kerangka demokrasi sebenarnya didasarkan pada tradisi keberaksaraan.

Memahami definisi tersebut, jelaslah bahwa esensi dari sebuah literasi informasi (*Information Literacy*) adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, menemukan, mengakses, mengevaluasi dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah, termasuk masalah sosial.

Walaupun keberadaan Literasi informasi ini sangat berhubungan dengan teknologi informasi, namun perlu diingat bahwa keberaksaraan informasi ini tidak sepenuhnya bergantung kepada ketersediaan ICT (*information communication technology*) yaitu komputer dan periferalnya. Menurut Stern (2002) bahwa *Information literacy "unplugged" = Information Literacy without electronic media*) yang mana sudah ada dan sampai sekarang dan ada di kebudayaan yang hanya memiliki pembelajaran "oral". Standar tentang literasi informasi yang disusun oleh *the Association of College and Research libraries* yang berisi 5 (lima) standar dan 22 (dua puluh dua) indikator *performance*, tidak mengatakan bahwa keberaksaraan informasi harus menggunakan teknologi digital atau ICT. (Standar ACRL. [http://www. Ala.org/acrl/ilcomstan.html](http://www.Ala.org/acrl/ilcomstan.html)).

Terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan berhubungan dengan kemampuan dalam literasi informasi, sebagai berikut :

The Nine essential steps for successfully solving an information problem:

1. Formulation and analysis of the information need.
2. Identification and appraisal of likely source of information.

3. Tracing and locating individual resources.
4. Examining, selecting, and rejecting individual resources.
5. Interrogating, or using, individual resources.
6. Recording and storing information.
7. Interpretation, analysis, synthesis, and evaluation of information.
8. Shape, presentation, and communication of information.
9. Evaluation of the assignment. (Eisenberg, 2004 : 51)

Sehubungan dengan kemampuan akses informasi, sebagaimana dikutip oleh Kalarensi Naibaho dalam Tesisnya yang berjudul *Information Literacy mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia peserta program dasar pendidikan tinggi 2003*, terdapat 3 (tiga) pembagian tingkatan Literasi Informasi yaitu sebagai berikut :

1. *Novice* adalah orang yang tidak memiliki konsep atau pengetahuan dan keahlian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencarian dan penggunaan informasi.
2. *Competent* atau *intermediate* adalah orang yang memiliki konsep atau pengetahuan mengenai penelusuran dan penggunaan informasi, tetapi tidak terampil menggunakannya atau sebaliknya.
3. *Expert* yaitu orang yang memiliki konsep atau pengetahuan mengenai penelusuran dan penggunaan informasi serta terampil menggunakannya.

Perilaku Pencari Informasi

Beberapa kajian telah dilakukan dengan pendekatan sosiologis untuk mengungkapkan perilaku yang dikaitkan dengan tata nilai, sastra, dan kedudukan pencari informasi dalam komunitasnya. Palmer membagi ilmuwan berdasarkan perilaku pencarian informasi menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu :

1. *Information Overlord* beroperasi pada sistem informasi secara ekstensif terkendali serta menghubungi sejumlah sumber informasi.
2. *Information Interpreneur* kurang menunjukkan kepercayaan terhadap sumber-sumber formal, serta berhubungan dengan sistem informasi secara ekstensif tetapi kurang terkendali.
3. *Information Hunter* menentukan sasaran pencarian lebih sempit sekaligus merupakan pemburu yang aktif.
4. *Information Pragmatist* mengkonsumsi informasi yang tidak teratur, tergantung pada kesempatan, dengan pola pencarian tidak beraturan karena tidak mempedulikan pengendalian.

5. *Information Plodder* jarang mencari informasi dari sumber formal dan mengandalkan sumber-sumber yang dimiliki.
6. *Information Derelict* tidak menelusuri satupun sistem informasi dan terlihat tidak menggunakan dan membutuhkan informasi. (Darmono:1994)

Dari pengelompokkan perilaku tersebut kiranya kita dapat mengukur sampai dimana atau sampai pada kelompok mana kondisi dan perilaku pencarian informasi masyarakat informasi kita di Indonesia.

Transformasi sosial memang sangat dibutuhkan, utamanya jika kita melihat proses sosial lewat tinjauan variabel yang sangat umum semacam transfer nilai dari dunia pertelevisian, internet dan beragam kemajuan teknologi komunikasi lain. Di sini tidak terlihat kerangka berpikir yang makro untuk sebuah kemajuan bangsa. Betapa tidak, televisi yang ditonton lebih dari 60 juta rakyat Indonesia, lebih dari 67% menyajikan pesan-pesan yang tidak jelas, pesan-pesan pragmatis dan bahasa-bahasa amoral. Hasilnya dengan mudah dapat diduga, manusia Indonesia menjadi sosok "matang karbitan".

Hal senada dengan pendapat tersebut adalah bahwa globalisasi informasi telah ikut menentukan dan membentuk pola pikir dan tingkah laku masyarakat yang mencakup : mobilitas sosial, gaya hidup, proses pengambilan keputusan serta berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, pendidikan dan tatanan tradisional. (<http://cabiklunik.blogspot.com/2007/09/esai-transformasi-sosial-dan-diplomasi.html>)

F. KEPUSTAKAWANAN DAN KEBEBASAN AKSES INFORMASI

1. Demokrasi Dialogics

Menurut Putu Laxman Pendit bahwa roh yang terkandung dalam RUU KMIP adalah demokrasi Dialogis. Demokrasi dialogis (*discourse or dialogue democracy*) adalah demokrasi yang mensyaratkan semua anggota masyarakat memiliki hak dan kemampuan untuk berdialog dalam rangka mengelola kehidupan mereka bersama. Prinsip-prinsip demokrasi dialogis lebih mengarah kepada pemberdayaan semua anggota masyarakat untuk tidak hanya memiliki akses ke informasi, tidak hanya berpartisipasi dalam proses politik (yang seringkali akhirnya hanya berwujud partisipasi di Pemilu) tetapi juga menggunakan informasi tersebut dalam diskursus dan dialog tentang hal-hal yang penting dan mendasar dalam kehidupan mereka.

Berbeda dengan dua bentuk demokrasi yang lain yaitu demokrasi kompetitif (*competitive democracy*) yang ditandai oleh kompetisi

bebas dan terbuka berbagai elemen masyarakat untuk menjadi dominan dalam politik sebuah negara, dan demokrasi partisipatoris (*participatory democracy*) yang ditandai oleh prasyarat keterwakilan yang adil dari semua elemen masyarakat dan partisipasi yang seluas-luasnya di berbagai lapisan masyarakat. Dimana demokrasi kompetitif lebih banyak menghasilkan dominasi teknokrat katimbang partisipasi meluas, sementara demokrasi partisipatoris seringkali terseok-seok karena kemampuan berpartisipasi di kalangan masyarakat yang lemah atau dibuat lemah.

Terlebih lagi kalau demokrasi kompetitif lebih menghasilkan teknologi yang *informing* (memberi informasi) sehingga ikut menciptakan masyarakat yang konsumen informasi lebih bersifat menerima dari pada meminta informasi. Sedangkan demokrasi partisipatoris memerlukan teknologi yang tidak harus massal dan segera (*instantenous*), namun teknologi informasi yang lebih komunal mengikuti ciri-ciri khas dari setiap elemen dan kepentingan berbeda di dalam masyarakat yang dibiarkan majemuk.

Dan merupakan kelebihan demokrasi dialogis adalah mendorong kelahiran dan penggunaan teknologi yang memungkinkan interaksi langsung, sedemikian rupa sehingga media yang kemudian tumbuh pesat adalah media yang melibatkan (*involving*) dan bukan hanya memberi informasi (*informing*). Berbagai bentuk siaran interaktif dan *talk sbows* adalah salah satu contoh dari ketersediaan teknologi yang memungkinkan publik secara luas berpartisipasi dan berdialog.

Dalam dunia kepustakawanan prinsip-prinsip "mencatat, menyimpan, memelihara, mengelola, menyediakan dan melayani pemberian informasi publik" haruslah dilihat sebagai strategi untuk tidak hanya memikirkan akses (*access*), tetapi juga penyediaan (*provision*) dan penyebaran (*dissemination*). Prinsip dan strategi yang sama sebenarnya juga sudah ada di dalam diri kepustakawanan dan segala turunannya.

2. Dokumen dan Informasi Terekam

Berbeda dengan "budaya lisan", yang memungkinkan pengguna informasi melakukan validasi dan verifikasi langsung kepada orang yang menyampaikan informasi, maka dalam "budaya rekaman", si pencipta dokumen digantikan oleh "petugas dokumentasi". Kepercayaan masyarakat tentang kualitas dokumen dan isinya ditumpukan kepada petugas ini. Dokumen itu harus mengandung di dalamnya otentitas yang menimbulkan kepercayaan (*trust*). Di dalam "budaya

rekaman” kita akan kehilangan kontak langsung dengan pencipta informasi, sehingga nilai dari informasi yang ada di dalam dokumen sangat bergantung pada seberapa percaya kita pada otentitasnya.

Sejalan dengan fungsi profesi kepustakawanan sebagai *intermediary* (keperantaraan) maka hal ini ditandai oleh ketelitian dan kemudahan-ditelusur (*retraceable*). Dan kecermatan inilah yang nantinya menimbulkan kepercayaan publik.

3. Kelimpahruhan Informasi, Relevansi, dan Klasifikasi

Ide dasar yang terkandung dalam RUU KMIP adalah persamaan hak dalam akses informasi, tidak boleh ada informasi yang mengandung pengecualian dan tidak boleh ada diskriminasi dalam masyarakat untuk memperoleh informasi. Implikasi langsung dari kedua azas di atas adalah ketersediaan informasi dalam jumlah besar.

Kepustakawanan sejak awalnya terlibat dalam urusan kelimpahruhan, relevansi, dan klasifikasi. Pada dasarnya sifat informasi yang terbuka akan menimbulkan komplikasi dalam pengelolaan, sehingga sejak awal kepustakawanan melengkapi diri dengan berbagai keterampilan dan alat kerja klasifikasi. Selain itu, pada dasarnya kepustakawanan mengartikan relevansi secara lebih terbuka, bukan atas dasar keputusan seorang petugas semata-mata, melainkan berdasarkan pada pengetahuan tentang kebutuhan informasi masyarakat. Dengan kata lain, klasifikasi apa pun yang akan dikenakan kepada informasi publik nantinya harus dibuat berdasarkan informasi yang cukup tentang hal-hal yang relevan di masyarakat. Itu artinya pula, klasifikasi ini harus sejak awal bersifat dinamis, sebab kehidupan dan kebutuhan informasi masyarakat pun tidaklah statis, apalagi terberi.

4. Information Literacy

Heidenwolf (2003) sebagaimana dikutip oleh Utami Hariyadi, menyatakan bahwa perkembangan dalam bidang jasa perpustakaan dan pendidikan tinggi dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut :

1. Instruksi perpustakaan (*library instruction*);
2. Reformasi pendidikan dan pemakaian sumber-sumber pembelajaran (tercetak atau elektronik) oleh mahasiswa (*educational reform and student use of learning resources*);
3. Pemakaian teknologi (*use of technology*);
4. Penilaian (*assessment*); (Hariyadi, 2005 : 35)

G. Kesimpulan

Merupakan keharusan bagi sebuah bangsa yang ingin bersaing di dunia global untuk memfokuskan perhatian terhadap informasi. Dimana hal ini dituntut adanya ketrampilan khusus dalam akses informasi dan kemajuan teknologi untuk dapat mengimbangi laju pertumbuhan arus informasi. Sementara kemampuan untuk akses informasi dapat tergambar dari tingkat literasi informasi yang meliputi : *Novice*, *Competent* atau *intermediate*, dan *Expert*. Sebuah kebijakan politik yang dapat menjamin kebebasan memperoleh informasi sangat membantu adanya persamaan hak akses (*Aquality Access*) dan transformasi sosial dalam masyarakat informasi.

Bahwa Kebebasan memperoleh informasi sangat erat hubungannya dengan Literasi informasi (*Information Literacy*) yang mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, menemukan, mengorganisasi, mengevaluasi dan menggunakannya untuk menjawab dan menyelesaikan masalah kehidupan, pekerjaan dan masalah sosial secara luas.

Lebih dari itu kebebasan informasi ini mendorong timbulnya masyarakat dan media yang *involving* (melibatkan) masyarakat untuk berperan aktif dalam proses transformasi sosial dan bukan hanya sebagai penerima informasi.

BIBLIOGRAFI

- Beni, Romanus. 1998. *Transisi Masyarakat Informasi Indonesia*. Sekapur sirih Pendidikan Perpustakaan di Indonesia 1952-2002: Kumpulan Artikel Alumni dan Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya UI. Jakarta : FIB UI.
- Darmono. 1994. *Kajian Pemakai dan sumbangannya kepada dunia Pusdokino* : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Vol.1. no.2. April. 1994.
- Eisenberg, Michael B. 2004. *Information Literacy : Essential Skills for the Information Age. 2 rd* . London : Library Unlimited.
- Eisenschitz, Tamara S. 1995. *Information Transfer Policy : Issues of control and access*. London : Library Association Publishing.
- Hariyadi, Utami. 2005. *Strategi Melakukan Keberaksaraan Informasi di Perpustakaan Sekolah* : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan. Vol.1, no.2, Juni 2005.

- Murnianto, dkk. 1997. *Dampak Globalisasi Informasi terhadap kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Depdikbud BPPP Nilai-nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Depdikbud.
- Panuju, Reni. *Memetics dan Surveillance dalam Transformasi Sosial*. http://www.infoperpus.8m.com/news/2002/11012002_1.htm, Suara Pembaharuan. Tanggal akses 29 Oktober 2007.
- Kepustakawanan dan kebebasan memperoleh informasi – dari *informing* menuju *involving*
- Pendit, Putu Laxman. 2006. *Kepustakawanan dan kebebasan memperoleh informasi – dari informing menuju involving*. www.petra.ac.id/library/foi/paper/Kepustakawanan%20dan%20kebebasan%20memperoleh%20informasi.doc.
- Prosiding Seminar Sehari Layanan Pusedokinfo Berorientasi Pemakai di Era Informasi. 1996.
- Sutarno NS. 2005. *Tanggung Jawab Perpustakaan dalam Mengembangkan Masyarakat Informasi*. Jakarta : Penta Rei. <http://cabiklunik.blogspot.com/2007/09/esai-transformasi-sosial-dan-diplomasi.html> *Lampung Post*, Minggu, 23 September 2007. Tanggal akses 29 Oktober 2007
- <http://meiliemma.wordpress.com/2006/10/17/evolusi-media-menuju-masyarakat-informasi/> Tanggal akses 29 Oktober 2007
- <http://kipas.wordpress.com/2007/07/19/hak-hak-masyarakat-terhadap-media-pers/> Tanggal akses 29 Oktober 2007
- http://www.ice.l.or.id/akses_informasi_partisipasi_dan_keadilan_di_indonesia.ice.l Tanggal akses 29 Oktober 2007
- Standar ACRL. <http://www.Ala.org/acrl/ilcomstan.html>.
- www.petra.ac.id/library/foi/paper/Kepustakawanan%20dan%20kebebasan%20memperoleh%20informasi.doc.
- <http://www.vitriyanespa.com/articles/20/1/e-Literacy/Page1.html>